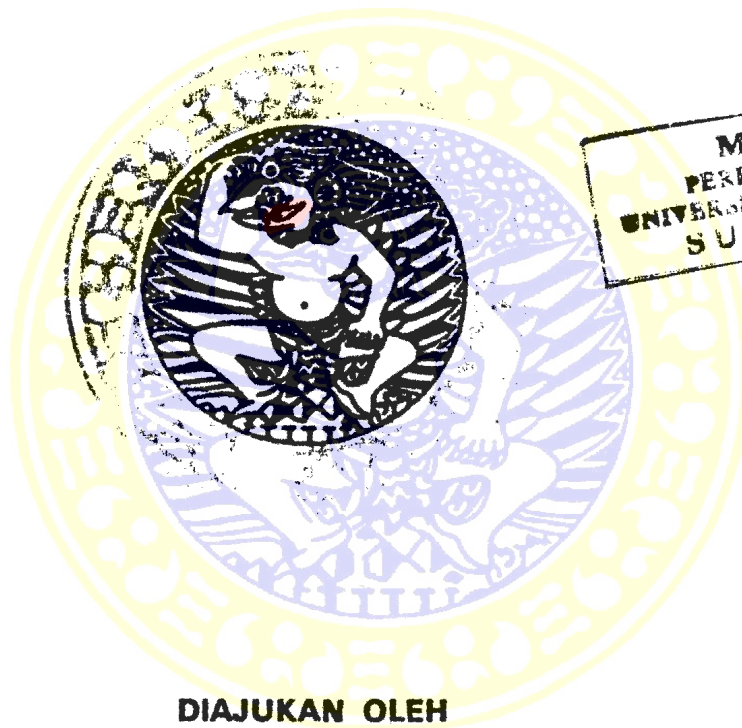


KK
A 57/02
Agu
S

SISTEM PENGENDALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DENGAN PEMROSESAN DATA ELEKTRONIK

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

DIAJUKAN OLEH

MAS AGUNG

No. Pokok : 049515103

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

SKRIPSI

SISTEM PENGENDALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DENGAN PEMROSESAN DATA ELEKTRONIK

DIAJUKAN OLEH
MAS AGUNG
No. Pokok: 049515103



TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Djoko Dewantoro".

Drs. DJOKO DEWANTORO, MSI., Ak.

TANGGAL...12-03-2002...

KETUA PROGRAM STUDI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muslich Anshori".

Dr. H. MUSLICH ANSHORI, SE., MSc., Ak.

TANGGAL...18-03-2002...

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang penting. Mekanisme pengawasan terhadap PPN yang selama ini telah dijalankan oleh fiskus terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) barulah sampai pada tingkat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, di mana setelah PKP memberitahukan berapa PPN yang terutang pada masa tersebut, fiskus baru dapat menguji kepatuhan PKP dengan mengadakan pemeriksaan.

Masalah yang kemudian timbul dari kondisi tersebut adalah keharusan KPP melakukan konfirmasi ketika transaksi yang dilakukan oleh suatu PKP melibatkan PKP lain yang tidak dilayani oleh KPP yang sama. Kendala yang terjadi adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan konfirmasi tersebut. Hal ini diperberat dengan kenyataan bahwa terdapat rasio yang sangat tidak seimbang antara PKP yang harus dilayani oleh suatu KPP dengan jumlah petugas yang mengelola urusan PPN (untuk KPP Surabaya Genteng, rasio ini adalah sekitar 3000 : 20).

Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat solusi berupa penerapan sistem pengendalian PPN dengan menggunakan pemrosesan data elektronik yang mampu melakukan konfirmasi *online*. Kondisi ideal yang seharusnya dicapai dalam sistem tersebut adalah perekaman aktivitas PKP sampai pada tingkat faktur pajak. Namun untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kesiapan internal aparat perpajakan sendiri dalam arti bahwa sistem *online* yang mampu mengelola SPT Masa harus dibentuk terlebih dahulu.

Pemilihan teknologi yang diperlukan dalam sistem pengendalian PPN dengan menggunakan pemrosesan data elektronik haruslah memperhatikan kondisi geografis Indonesia serta kebutuhan kecepatan transfer data. Dasar-dasar ilmu yang diperlukan dalam pemilihan teknologi untuk sistem tersebut adalah Pemrosesan Data Elektronik, Komunikasi Data, Jaringan Komputer, serta Basis Data.